

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA  
BERSAMA (KUBE) DI NAGARI BALIMBING, KECAMATAN RAMBATAN,  
KABUPATEN TANAH DATAR, SUMATERA BARAT**

Febriani<sup>1</sup>, Aufarul Marom<sup>2</sup>, Herbasuki Nurcahyanto<sup>3</sup>

[ffebriani658@gmail.com](mailto:ffebriani658@gmail.com), [aufarulmarom@lecturer.undip.ac.id](mailto:aufarulmarom@lecturer.undip.ac.id),  
[herbasukinurcahyanto@lecturer.undip.ac.id](mailto:herbasukinurcahyanto@lecturer.undip.ac.id)

**Program Studi Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jalan Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kontak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405 Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

Poverty is still a problem in the world, including Indonesia. One form of handling it is by empowering the community through the KUBE program. One of them is in the Jorong Bukit Tamasu area, Nagari Balimbing which is named KUBE Palano Jaya. The purpose of this research to analyze the implementation of empowerment for the KUBE Palano Jaya beneficiary group and analyze the impact after the empowerment had been given to the Palano Jaya KUBE beneficiary group. Aspects of this research is the implementation includes the preparation stage, the implementation stage, the business development stage, the termination stage and the impact includes positive impacts, outputs, and outcomes. The method used in this study is a qualitative research method. The results of this research indicate that KUBE Palano Jaya is still in the developing stage because the business carried out is still in a small scope. In addition, in the sustainability of the Palano Jaya KUBE business development, there are no future plans. Therefore, he is only running his current business, namely saving and borrowing members and renting rice fans. The impact after the assistance to KUBE Palano Jaya has not been able to fully meet the needs of group members.

Keywords : Poverty, Community Empowerment, Impact, KUBE

---

<sup>1</sup>NIM 14020118120037, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>NIP 196005281987031001, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>NIP 196003181987101001, Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah bagi negara – negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagaimana pendapat dari Yacoub, 2012 (dalam Debrina Vita Ferezagia, 2018) menyebutkan bahwa kemiskinan sebagai masalah global yang dihadapi banyak negara dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hardinandar, 2019 (dalam Laga Priseptian, et. al, 2022) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, obat – obatan, dan tempat tinggal.

Berikut ini data mengenai persentase kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Kemiskinan Indonesia Tahun**  
**2017 – 2021**

No	Tahun	Persentase Kemiskinan			
		Perkotaan		Pedesaan	
		Maret	September	Maret	September
1	2017	7,72	7,26	13,93	13,47
2	2018	7,02	6,89	13,20	13,10
3	2019	6,69	6,56	12,85	12,60
4	2020	7,38	7,88	12,82	13,20
5	2021	7,89	7,60	13,10	12,53

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Adanya masalah kemiskinan ini nyatanya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Christanti, 2013 (dalam Noor Zuhdiyaty, 2017) bahwasanya kemiskinan di dalam negara atau daerah terkait adalah bentuk gambaran dari tingkat atau derajat kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam negara atau daerah tersebut. Dalam hal ini kaitannya dengan data pada tabel 1.1 adalah tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan persentasenya lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Dengan demikian akan berdampak terhadap kesejahteraan yang didapatkan oleh masing – masing individu maupun kelompok yang ada.

Menanggapi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan landasan yuridis berupa UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa adanya suatu kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, fasilitas, dan pendampingan sebagai usaha terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar atau pokok setiap warga negara.

Peranan dari adanya pemberdayaan masyarakat dinilai sangat penting dalam hal

mengurangi ketimpangan kesejahteraan pada masyarakat. Hakekatnya, masyarakat yang sudah sejahtera pada umumnya memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam artian, mereka tidak lagi bergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, mereka yang kurang berdaya membutuhkan bantuan dari pemerintah, dermawan, dan sektor masyarakat lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI sebagai salah satu fasilitator dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Salah satu bentuk program pemberdayaan kepada masyarakat dari Kemensos RI adalah program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE sebagai usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin yang mana melalui proses pembentukan kelompok, tumbuh, dan berkembang (tertuang di dalam Permensos No. 2 Tahun 2019). Keanggotaan KUBE terdiri atas 5 – 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang tercatat dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPPFMOTM).

Implikasi dari program KUBE sendiri dilimpahkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu diantaranya di wilayah Kecamatan Rambatan, Sumatera Barat. Berdasarkan pemaparan dari Kabid Pemberdayaan

Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Tanah Datar mengatakan bahwa di Kabupaten Tanah Datar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan paling banyak terdapat di Kecamatan Rambatan, Kecamatan Batipuh, Kecamatan X Koto, dan Kecamatan Lintaubuo Utara. Dari kecamatan tersebut terpilih-lah Kecamatan Rambatan sebagai penerima bantuan KUBE oleh Kementerian Sosial RI pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasusnya di wilayah Nagari Balimbing dengan pertimbangannya adalah Nagari Balimbing diketahui sebagai nagari peringkat 2 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Rambatan berdasarkan data pada tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan melalui data berikut ini.

**Tabel 2**  
**Kemiskinan Kec. Rambatan**

No	Nagari	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1	Rambatan	2.383	15,57 %
2	Padang Magek	2.497	16,31 %
3	III Koto	3.217	21,02 %
4	Balimbing	3.453	22,56%
5	Simawang	3.754	24,53 %

Sumber : Eka Kharisma (2021)

Bantuan KUBE sendiri di Nagari Balimbing diberikan kepada 2 Jorong

yaitunya Jorong Bukit Tamasu dan Sawah Kareh. Dikarenakan adanya pandemi Covid 19 KUBE di Jorong Sawah Kareh berhenti (bubar). Oleh karenanya, hanya satu KUBE yang masih berfungsi yaitu nya KUBE Palano Jaya yang berada di Jorong Bukit Tamasu. Dalam keberjalanannya lebih kurang dalam kurun waktu 2 tahun ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi KUBE Palano Jaya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pendamping KUBE Palano Jaya pada Jum'at, 25 Maret 2022.

1. Jumlah anggota KUBE Palano Jaya yang berkurang dari awalnya berjumlah 10 orang menjadi 4 orang
2. Pembukuan atau administrasi keuangan KUBE Palano Jaya yang belum baik dan rapi dalam penulisannya
3. Usaha kelontong berjalan kurang lebih 1 tahun, kemudian diganti dengan alat pertanian kipas padi dan simpan pinjam anggota KUBE
4. Monitoring yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar sudah lama tidak ada semenjak satu tahun kebelakang

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut pada KUBE Palano Jaya untuk melihat lebih dalam bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan pada KUBE Palano Jaya serta dampak yang

ditimbulkan setelah adanya bantuan usaha ini terhadap KUBE Palano Jaya. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing.
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Administrasi Publik**

- 1) Administrasi publik adalah melakukan kekuasaan atau kegiatan politik sebagai

kegiatan dari pemerintah (Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koenig).

- 2) Administrasi publik adalah pelaksanaan hukum atau aturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang dilaksanakan oleh organisasi/kelompok maupun perseorangan (George J. Gordon).
- 3) Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari terkait penerapan dari politik negara (Arifin Abdurachman).
- 4) Administrasi publik merupakan negara yang dikatakan sebagai organisasi dan administrasi dengan tujuannya untuk mencapai hal – hal terkait kenegaraan (Prajudi Atmosudirojo).
- 5) Administrasi publik adalah ilmu yang berkaitan dengan badan pemerintahan yang diatur, dilengkapi dengan tenaganya, dibiayai, dijalankan dan dipimpin (Edward H. Litchfield).

## **B. Manajemen Publik**

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan oleh orang lain, dikemukakan oleh Marry Parker Follet.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi tertentu, dikemukakan oleh James A. Stoner. Berdasarkan penelitian dari Rainey dan Han Chun (2005, h.92 – 94) menyebutkan beberapa hal mengenai manajemen publik diantaranya :

1. Lingkungan di bidang administrasi publik adalah kurangnya orientasi ekonomi dalam pemerintahan dan tingginya pengaruh aspek politik internal dan eksternal, yang berarti bahwa pengelolaan sektor publik dipengaruhi oleh mekanisme politik dan negara seperti lobi negosiasi dan opini publik. Artinya terpengaruh.
2. Pemerintah berada di bawah tekanan kuat untuk keadilan, daya tanggap, kejujuran, keterbukaan dan akuntabilitas.
3. Adanya peran, struktur, dan proses organisasi yang menyebabkan tingginya tingkat ambiguitas dan konflik mengenai tujuan organisasi, proses birokrasi dan membingungkan, lambat dan tidak inovatif.

## **C. Kemiskinan**

Kemiskinan menurut Suharto (2010 : 134) diartikan dari segi ekonomi, khususnya berkaitan dengan pendapatan

dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non material yang diterima seseorang. Dikemukakan juga oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum atau batasan kemiskinan. Suharto (2009) menjelaskan mengenai dimensi – dimensi kemiskinan meliputi : ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kurangnya akses untuk memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan dan kebersihan, tidak adanya jaminan masa depan keluarga, adanya sikap rentan individu, rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya SDA, kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial, tidak adanya akses lapangan pekerjaan, terbatasnya kemampuan untuk berusaha dikarenakan cacat fisik maupun mental, serta ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, kelompok marginal dan terpencil.

#### **D. Pemberdayaan Masyarakat**

Gunawan (2009 : 102) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai tindakan sosial sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan

sumber daya yang dimiliki. Sumaryadi (2005 : 114 – 115) menjelaskan tujuan dan sasaran dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah: (1) Mendukung pembangunan manusia yang sejati dan esensial bagi kelompok-kelompok lemah, rentan, miskin dan kecil, termasuk pekerja pedesaan, masyarakat berkembang, dan kaum miskin. (2) memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi agar dapat lebih mandiri, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- Sasaran dari program pemberdayaan masyarakat dalam usaha mencapai kemandirian masyarakat meliputi : (1) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi untuk kemajuan dan kemandirian bersama. (2) Meningkatkan taraf hidup yang lemah, lemah, tidak berdaya dan miskin melalui pemahaman yang lebih baik, peningkatan pendapatan dan tindakan menuju kemandirian usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi. (3) meningkatkan kapasitas dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajerial untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok.

## **E. Program KUBE**

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta (2013 : 307) mendefinisikan mengenai KUBE sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial terkhusus pada Bidang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP). Kementerian Sosial RI (2010 : 13) menjelaskan mengenai tujuan dari KUBE yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota KUBE
- b. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE untuk menghindari dan menghadapi masalah yang timbul baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial
- c. Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok KUBE dalam menjalankan peran sosialnya

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah

deskriptif untuk menggambarkan gejala maupun kejadian di lapangan secara sistematis dan akurat pada daerah tertentu. Lokasi penelitian ini adalah di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini, narasumbernya meliputi : penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Kepala Jorong Bukit Tamasu, pendamping KUBE Wilayah Kecamatan Rambatan, Pegawai Dinas Sosial & PPPA Kabupaten Tanah Datar, dan Sekretaris Dinas Sosial & PPPA Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Kelompok Penerima Bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing**

#### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan orientasi dan observasi lokasi penerima bantuan KUBE. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memberikan arahan kepada Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar untuk melakukan survei lokasi di wilayah Kab. Tanah Datar yang memungkinkan untuk diberikan bantuan KUBE. Melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) didapatkan opsi kecamatan dengan

jumlah penduduk miskinnya tinggi yaitunya Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lintaubuo Utara, dan Kecamatan Sungai Tarab. Pada saat survei lokasi tersebut stakeholders yang terlibat adalah bidang pemberdayaan sosial & fakir miskin Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar, TKSK Kecamatan, dan perangkat nagari yang bersangkutan. Setelah verifikasi data melalui DTKS, Kecamatan Rambatan terpilih sebagai satu – satunya lokasi yang menerima bantuan KUBE. Di Kecamatan Rambatan terdapat 5 Nagari, salah satunya Nagari Balimbing yang mana terdapat KUBE di Jorong Bukit Tamasu.

Adapun alur untuk registrasi dan identifikasi calon penerima bantuan KUBE untuk wilayah Jorong Bukit Tamasu meliputi : (1) Wali Nagari melalui Jorong Bukit Tamasu mengumpulkan persyaratan terkait dengan ketentuan KUBE, (2) setelah semua data terkumpul diverifikasi oleh dinas sosial kabupaten sebagai bentuk uji kelayakan mana yang pantas menerima atau tidaknya sebagai penerima manfaat KUBE, dan (3) kemudian dikirimkan ke dinas sosial provinsi dan terakhir ke pusat.

Perencanaan program KUBE sendiri dari Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar hanya menjalankan program yang sudah disusun oleh Kementerian Sosial dengan berpedoman kepada Permensos No. 2 Tahun 2019. Sebagai

langkah awal dari Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar adalah dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk BIMTEK (Bimbingan Teknis) kepada calon penerima manfaat KUBE. Dalam BIMTEK tersebut dijelaskan mengenai gambaran umum dari bantuan KUBE itu sendiri.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai lanjutan dari BIMTEK yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini disebut sebagai pelatihan yang diberikan anggota KUBE. KUBE di Jorong Bukit Tamasu sudah 5 kali dari pihak dinas sosial mengadakan BIMTEK tersebut yang disesuaikan dengan perkembangan dari KUBE itu sendiri. Pada saat BIMTEK dilakukan, selain Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar pihak yang terlibat lainnya adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan dinas atau instansi yang terkait dengan usaha yang akan dijalankan oleh KUBE tersebut.

Pembentukan kelompok KUBE dibentuk oleh Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar berdasarkan kepada data DTKS. Di Jorong Bukit Tamasu dari data yang ada terdapat 18 orang, setelah verifikasi data ditetapkan 10 orang untuk dibina menjadi satu kelompok KUBE.

KUBE tersebut tidak lain dinamai sebagai KUBE Palano Jaya.

Pemilihan jenis usahanya diberikan opsi oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat seperti dagang barang harian, peternakan, dan pertanian. Namun, dari Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar tidak merekomendasikan kepada kelompok KUBE untuk usaha peternakan dikarenakan pada saat itu kurang baik kondisinya untuk usaha tersebut. Kemudian dimintai usulan kepada kelompok sasaran mengenai pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan, rata – rata memang memilih usaha dagang barang harian dikarenakan usaha tersebut lebih memungkinkan untuk dijalankan di lokasi penerima bantuan KUBE. Tidak terkecuali untuk KUBE Palano Jaya di Jorong Bukit Tamasu yang juga menjalankan usaha dagang barang harian.

Penyaluran modal rencana awalnya dalam bentuk uang namun berubah dalam bentuk barang. KUBE Palano Jaya usahanya adalah dagang barang harian maka dikirimkan barang – barang kebutuhan harian seperti beras, gula, showcase, dan lainnya. Untuk nominal modal kelompok KUBE pada dasarnya sudah ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000. Namun, dari anggota KUBE sendiri tidak mengetahui jika modal yang mereka terima sebanyak yang sudah ditetapkan tersebut.

Pendampingan yang diberikan oleh pendamping KUBE sendiri dengan datang langsung ke lapangan atau lokasi KUBE itu berada setiap bulannya. Pada pertemuan tersebut, anggota dikumpulkan dan dilakukan pengecekan pembukuan atau administrasi dari usaha KUBE. Jika pendamping berhalangan hadir, maka bisa dikomunikasikan di dalam WA grup KUBE. Serta biaya untuk pendamping dianggarkan dari dana operasional. Ditaksir untuk uang transportnya adalah Rp. 75.000 yang dibuktikan dengan surat perjalanan kerja.

### **3. Tahap Pengembangan Usaha**

Pada awal pengelolaan usaha dagang harian KUBE palano jaya tidak baik dikarenakan mengalami kerugian. Setelah adanya pemecahan masalahnya dan dipindah lokasi ke rumah ketua KUBE baru mulailah usahanya berkembang dan menghasilkan keuntungan. Selama lebih kurang 1 tahun usahanya dijalankan kemudian diganti dengan usaha simpan pinjam anggota KUBE dari modal yang ada dan usaha sewa kipas padi.

Monitoring dari pihak dinas sosial melalui pelaporan langsung setiap bulannya dari pendamping kepada dinas sosial. Sedangkan monitoring yang dilakukan oleh pihak dinas sosial kepada penerima manfaat KUBE Palano Jaya dalam kurun waktu

sekali 6 bulan dengan tinjauan langsung ke lapangan. Namun dikarenakan kepengurusan dinas sosial yang baru sudah setahun tidak ada tinjauan langsung dari dinas sosial ke lokasi KUBE palano jaya.

Evaluasi dari pihak dinas sosial terhadap KUBE palano jaya adalah kurangnya komitmen anggota yang awalnya berjumlah 10 orang menjadi 4 orang. Sedangkan Evaluasi dari pendamping KUBE sendiri tidak ada evaluasi yang berarti dikarenakan masih dalam kondisi yang aman semenjak masalah waktu itu.

#### **4. Tahap Terminasi**

KUBE palano jaya masih dikategorikan berkembang dikarenakan minimnya modal yang dimiliki dan belum bisa mencukupi kebutuhan anggota KUBE secara maksimal. Selanjutnya untuk keberlanjutan usaha dari KUBE Palano Jaya sendiri dari pendampingnya menyerahkan kepada anggotanya. Sedangkan dari sisi anggotanya masih belum ada rencana kedepannya untuk pengembangan usahanya, hanya saja saat ini dari KUBE Palano Jaya sendiri melakukan penambahan modal saja dari keuntungan usahanya.

#### **B. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Adanya Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Kelompok Penerima**

### **Bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing**

#### **1. Dampak Positif**

Dampak positif yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima manfaat KUBE palano jaya di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing adalah : (1) adanya kepekaan sosial yang timbul dari anggota KUBE yang sebelumnya kurang adanya interaksi antar masyarakat sekitar. (2) adanya kesibukan baru yang semula hanya diam santai dirumah tidak ada pekerjaan apapun hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

#### **2. Output**

Dampak hasil dari KUBE adalah keuntungan dari usaha yang dijalankan. Hasil dari keuntungan KUBE sendiri ada pembagian persentasenya. Namun pada KUBE palano jaya tidak menerapkannya dikarenakan kesepakatan anggota KUBE untuk dibagi rata. Sebelumnya saat masih menjalankan usaha dagang barang harian untuk keuntungan usahanya dibagi sekali 3 bulan. Sedangkan untuk usaha yang baru saat ini yaitu sewa kipas padi kesepakatannya dibagi sekali 6 bulan

dengan membagi hasil keuntungan jasa yang didapatkan.

### **3. Outcome**

Manfaat yang dirasakan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima manfaat KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing adalah membantu usaha utama dari anggota KUBE setelah adanya simpan pinjam anggota. Seperti ketua KUBE Ibu Jusmaniar yang menggunakan modalnya untuk membuka usaha kecil – kecilan dirumahnya, sedangkan bendahara KUBE Ibu Ardiwati menggunakan modalnya untuk tambahan usaha jahit yang sudah dirintis suaminya. Selain itu juga dijelaskan dengan adanya KUBE ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian anggota KUBE walaupun masih belum maksimal dalam mencukupi kebutuhannya.

## **KESIMPULAN**

### **1. Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Kelompok Penerima Bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing**

#### **A. Tahap Persiapan**

Dalam tahap persiapan terdapat indikator – indikator meliputi:

- Orientasi dan observasi
- Registrasi dan identifikasi

- Perencanaan program pelaksanaan

#### **B. Tahap pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan terdapat indikator – indikator meliputi:

- Sosialisasi program kepada masyarakat
- Seleksi dan pembentukan kelompok
- Pemilihan jenis usaha
- Penyaluran bantuan modal usaha
- Pendampingan

#### **C. Tahap pengembangan usaha**

Dalam tahap pengembangan usaha terdapat indikator – indikator meliputi :

- Pengembangan jenis usaha
- Monitoring
- Evaluasi

#### **D. Tahap terminasi**

Dalam tahap terminasi ini dilihat apakah KUBE sudah mandiri atau belum.

### **2. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Adanya Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Kelompok Penerima Bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing**

#### **A. Dampak positif**

Dampak positif berhubungan dengan peningkatan keadaan berupa sikap perilaku,

kesejahteraan, partisipasi, dan tingkah sosial lainnya.

### **B. Output**

Output berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan.

### **C. Outcome**

Outcome berhubungan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok sosial dalam masyarakat.

## **SARAN**

### **1. Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Kelompok Penerima Bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing**

- Masih perlu pemahaman lebih lanjut mengenai bantuan KUBE oleh pihak terkait seperti dinas sosial maupun pendamping KUBE.
- Perlu adanya transparansi dalam pelaksanaan dari prosesnya terkhususnya nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat sasaran.
- Monitoring yang dilakukan harus lebih sistematis atau teratur agar memang tujuan yang diinginkan tercapai nantinya
- Sebaiknya ada evaluasi yang diberikan oleh dinas sosial maupun pendamping KUBE dalam hal memberikan masukan atau ide untuk pengembangan usaha dari KUBE Palano Jaya.

### **2. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Adanya Pelaksanaan Pemberdayaan Kepada Kelompok Penerima Bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing**

- Dampak yang dirasakan anggota KUBE belum bisa dalam mencukupi kebutuhan anggota secara maksimal, oleh sebab itu sebaiknya dari pendamping melakukan diskusi dengan KUBE Palano Jaya untuk mencari alternatif usaha lain yang bisa dijadikan ide usaha baru.
- Dalam memberikan pendampingan kepada KUBE Palano Jaya sebaiknya ada pemberian motivasi dalam rangka meningkatkan minat dan motivasi anggota KUBE dalam mengembangkan usahanya.
- Sebaiknya dari pendamping KUBE ada menerapkan manajemen pengelolaan pelaksanaan pendampingan kepada KUBE Palano Jaya agar tujuan serta dampak yang dihasilkan nantinya memang sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjei, E. e. (2022). Assessing the Impact of Hydro Energy Project on Poverty Alleviation : the Case of Bui Dam in Ghana. *Energy Policy*.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Sleman: Deepublish.

- Dubois, L. (2021). The Impact of Solidarity Economy on Poverty : the Case of Public Centres of Solidarity Economy in Bahia, Brazil. *World Development Perspectives*.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hariani, D. (2013). *Azas - Azas Manajemen*. Semarang: CV. Majuno.
- Ikeanyibe, O. M. (2017). Governance Paradigm in Public Administration and the Dilemma of Nation Question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1).
- Karunia, S. J. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Pada KUBE Fakir Miskin "Sama Handi" di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 23 - 30.
- Kharisma, E. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Nagari Balimbing. Batusangkar.
- Mahino, D. G. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Margayaningsih, D. I. (n.d.). Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.
- Maryani, D. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish.
- Mashitoh, R. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Respon Publik*, 16(1), 31 - 38.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhajirin, M. P. (2017). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. UNPAD Press.
- Mustofa, B. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 5(2).
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953-960.
- Nasmi, M. H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintang Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Nurmayanti, S. d. (2020). Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 7(2).

- Paulu, N. T. (2022). Pengaruh Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(1).
- Poma, M. D. (2018). Transparansi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, V(1).
- Pratiwi, D. P. (n.d.). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Desa Grecol Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga).
- Priseptian, L. W. (2022). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45 -53.
- Putro, B. N. (2020). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Batu Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3).
- Rahmat, P. (2021). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1).
- Rui, G. d.-y. (2021). Does Empowering Women Benefit Poverty Reduction? Evidence from a Multi - Component Program in the Inner Mongolian Autonomous Region of China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4).
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sewell, S. e. (2019). A Comparative Study of Community Perceptions Regarding the Role of Roads as a Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas. *Journal of Rural Studies*, 73 - 84.
- Sulastri, R. E. (2020). Pengelolaan Keuangan dan Pemasaran Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Zaizha. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat PNP*, 2(2), 86-90.
- Wijaya, A. F. (2014). *Manajemen Publik : Teori dan Praktek*. Malang: UB Press.
- Wildanu, E. A. (2021). Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *SOSFILKOM*, XV(1).
- Wulpiah. (2019). Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka. *Scientia : Jurnal Hasil Penelitian*, 4(1), 17 - 39.
- Yuliartati, I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Madani*, 4(2).
- Zuhdiyaty, N. (2017). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *JIBEKA*, 11(2), 27 - 31.
- Zulkarnain, T. A. (2020). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(1).

**Undang – Undang:**

UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Permensos No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

**Sumber Lainnya :**

128 Ribu Jiwa di Tanah Datar Hidup Dibawah Garis Kemiskinan. (2019). Dalam

[https://prokabar.com/128-ribu-jiwa-di-tanah-datar-hidup-dibawah-garis kemiskinan/](https://prokabar.com/128-ribu-jiwa-di-tanah-datar-hidup-dibawah-garis-kemiskinan/). diakses 22 Mei 2022.

RPJM Nagari Balimbing Tahun 2018 – 2023.

Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar.

Badan Pusat Statistik.